

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mencari perbandingan antara beberapa peneliti agar dapat menghindari kesamaan atau plagiasi dari masing-masing peneliti. Penelitian ini menggunakan beberapa literatur terdahulu untuk menjadi acuan bagi penulis melakukan penelitian, sehingga penulis mendapatkan pengetahuan lebih terkait analisis atau teori yang digunakan dalam melakukan penelitian. Penulis menggunakan beberapa literatur terdahulu untuk mendapatkan referensi untuk memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Berikut adalah beberapa jurnal acuan utama terkait dengan penelitian penulis.

Penelitian terdahulu yang pertama yang berjudul Pengaruh Pengaruh Kemiskinan, PDRB Dan PAD Terhadap Pembangunan Manusia Di Jawa Timur dalam penelitian ini menggunakan analisis data panel dengan menggunakan Eviews 9. Dimana ditemukan hasil menunjukkan perkembangan indeks pembangunan manusia masih berada di dalam level menengah bawah dan menengah atas. Hasil regresi menunjukkan secara simultan variabel kemiskinan, PDRB dan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 37 kab/kota di Jawa Timur. Dalam penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat sasaran untuk meminimalisir kemiskinan yang ada. Selanjutnya dengan mengubah perilaku konsumsi masyarakat agar dapat menyisihkan pendapatan untuk menabung. dengan mengubah perilaku konsumsi, diharapkan masyarakat menjadi sejahtera karena masyarakat tidak lagi berperilaku konsumtif.

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Jahtu Widya Ningrum dkk yang berjudul Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam Perspektif Islam. Dimana dalam penelitian ini bertujuan untuk ntuk mengetahui pengaruh kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tentang Human Development Index (HDI) di Indonesia tahun 2014-2018 dalam perspektif Islam. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi data panel dengan pendekatan model pool software Eviews 9, dimana data didapatkan dari data yang telah dipublikasi dari beberapa sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan variabel pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan semua variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPM dan memiliki pengaruh yang ditunjukkan melalui R<sup>2</sup> sebesar 80,78% yang menunjukkan bahwa variabel kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dapat menjelaskan variabel Y, sisanya 19,22% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel penelitian

Penelitian selanjutnya yang digunakan penulis sebagai acuan penulisan adalah penelitian yang dilakukan oleh Sri Ramadhani dan Cahyo Utomo yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan Dana Bantuan Pemerintah Terhadap Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi dan bantuan pemerintah dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan

melakukan metode uji asumsi klasik sebelum mengumpulkan model penelitian terbaik. Sampel penelitian adalah 15 kabupaten / kota di Provinsi Jawa Tengah. Data Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari Lembaga Pusat Statistik Indonesia. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah serta Dana Alokasi berpengaruh secara simultan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Oleh karena itu penulis telah merangkum kajian teori yang digunakan pada table berikut ini yang menunjukan kesimpulan hasil serta teori yang digunakan.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

| Nama                       | Variabel   | Metode Analisis                          | Hasil Analisis  |
|----------------------------|--|--|---|
| Adriana, Moehammad, Rafael | Pengaruh Kemiskinan, PDRB, dan PAD terhadap Indeks Pembangunan Manusia | Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi | Hasil regresi menunjukkan secara simultan variabel kemiskinan, PDRB dan PAD memiliki pengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di 37 kab/kota di Jawa Timur |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  | di Jawa Timur  |  |  |
| Jahtu Widya Ningrum, Aziza Hanifa Hairunnisa, Nurul Huda | Pengaruh Kemiskinan, Tingkat Pengangguran, dan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia Tahun 2014-2018 dalam | Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi | Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel kemiskinan dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap IPM, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerintahan variabel pengeluaran tidak berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara simultan semua variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap IPM |

|                                     |   |  |   |
|-------------------------------------|---|--|---|
|                                     | Perspektif<br>Islam   |  |   |
| Sri ramadhani<br>dan Cahyo<br>Utomo | Pengaruh<br>Pendapata<br>Asli Daerah,<br>Dana<br>Alokasi dan<br>Dana<br>Bantuan<br>Pemerintah<br>Terhadap<br>Peningkatan<br>Indeks<br>Pembangun<br>an Manusia | Analisis<br>Deskriptif<br>dan<br>Analisis<br>Regresi | Hasil penelitian ini<br>menyimpulkan bahwa<br>Pendapatan Asli Daerah<br>serta Dana Alokasi<br>berpengaruh secara simultan<br>terhadap Indeks<br>Pembangunan Manusia |

## 2.2 Tinjauan Pustaka atau Landasan Teori

### 1 Teori Kesejahteraan Manusia (Indeks Pembangunan Manusia)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah proses pertumbuhan dan perubahan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, dan tingkat kesejahteraan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) harus terjadi pada semua aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lingkungan, oleh sebab itu tujuan utama pembangunan manusia adalah pada manusia dan kesejahteraannya. Konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memang terdengar

berbeda dibanding konsep klasik pembangunan yang memberikan perhatian utama pada pertumbuhan ekonomi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bertujuan untuk memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memilih hidup penuh dengan kebebasan dan bermartabat. Tidak hanya itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga menyinggung tentang perluasan kemampuan individu dan komunitas untuk memperluas jangkauan pilihan mereka dalam upaya memenuhi pendapatnya. Dari sudut pandang Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan sebuah pemikiran yang mendasar dalam konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Sudut pandang ini menggantikan konsep pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pendapatan per kapita yang digunakan oleh perencana kebijakan sebelumnya. United Nation for Development Programme (UNDP) menempatkan manusia sebagai asset kekayaan bangsa yang sesungguhnya pertumbuhan ekonomi yang dipandang dari sisi perdagangan, investasi, dan teknologi merupakan hal yang esensial. Akan tetapi, hal itu hanya melihat manusia sebagai alat untuk mencapai pertumbuhan, dan bukan sebagai tujuan dari pembangunan.

Namun dengan demikian, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk tercapainya pembangunan manusia, karena pembangunan ekonomi mampu meningkatkan produktivitas dan peningkatan pendapatan melalui kesempatan kerja. Hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berlangsung melalui dua macam jalur yaitu, Jalur pertama dengan melalui kebijaksanaan dan pengeluaran pemerintah.

Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah pengeluaran pemerintah untuk sektor pembantu sosial yang merupakan prioritas seperti pendidikan dan kesehatan dasar. Besarnya pengeluaran dalam bidang itu menunjukkan indikasi bahwa komitmen pemerintah terhadap Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) sangat besar. Jalur kedua yaitu dengan melalui kegiatan pengeluaran rumah tangga. Dalam hal ini faktor yang menentukan adalah besar dan komposisi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan dasar seperti sandang pangan, untuk biaya pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar, serta untuk kegiatan lain yang serupa.

## 2 Teori Pendapatan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dimana suatu daerah dapat menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah, terjadi karena adanya proses penyerahan sejumlah kekuasaan atau kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana implementasi kebijakan desentralisasi memerlukan banyak faktor pendukung.

Salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah kemampuan daerah untuk membiayai pelaksanaan kekuasaan atau kewenangan yang dimilikinya. Biaya pelaksanaan otonomi daerah didapat melalui penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah.

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu unsur permintaan agregat, pengeluaran pemerintah adalah variabel pembentuk Produk domestik Bruto (PDB). Selain permintaan dari sektor rumah tangga untuk barang konsumsi dan jasa, sektor bisnis untuk barang-barang investasi, sektor pemerintah untuk barang, jasa, dan pengeluaran sektor luar negeri untuk ekspor dan impor. Teori pengeluaran pemerintah digolongkan menjadi dua yaitu, teori Mikro dan Makro. Dari kedua teori tersebut terdapat dua sudut pandang yang berbeda dan bersangkutan dengan pengeluaran pemerintah dan berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi atau pendapatan nasional. Kedua pandangan tersebut dapat dijelaskan dalam kajian teori di bawah:

#### 1) Teori Keynes

Identitas keseimbangan pendapatan nasional  $Y = C + I + G + X - M$  merupakan sumber yang dibenarkan oleh pandangan kaum Keynesian akan keterkaitan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan dalam pengeluaran. Disamping itu pemerintah perlu menghindari peningkatan perannya agar tidak melemahkan kegiatan pihak swasta dalam perekonomian.

Menurut teori Keynes suatu perekonomian makro ditentukan oleh apa yang terjadi dengan permintaan agregat masyarakat, apabila permintaan agregat melebihi penawaran agregat dalam periode tersebut maka akan terjadi situasi kekurangan produksi. Pada periode berikutnya output akan naik atau harga akan naik, atau keduanya terjadi bersama.

Sebaliknya jika permintaan agregat kecil daripada penawaran agregat, maka situasi kelebihan produksi terjadi. Pada periode berikutnya output akan turun atau harga akan turun, atau keduanya terjadi bersama-sama. Banyak para ahli ekonomi public yang telah memberi perhatian pada penyelidikan hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan tingkat

pertumbuhan ekonomi semenjak mereka sadar bahwa, pengeluaran pemerintah memegang peranan yang sangat penting. Pengeluaran pemerintah ini dapat dipandang sebagai pembelanjaan otonomi karna pendapatan nasional bukan faktor yang penting untuk mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja.

## 2) Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah

Menurut Todaro dan Smith (2006) pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus menerus atau berkelanjutan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar. Tiga komponen pertumbuhan ekonomi yang penting bagi setiap masyarakat adalah (1) Akumulasi modal, seperti investasi tanah, peralatan fisik dan sumber daya manusia (SDM) melalui perbaikan di bidang pendidikan dan keterampilan kerja, (2) pertumbuhan jumlah penduduk yang menyebabkan pertumbuhan angkatan kerja, (3) kemajuan teknologi yang dapat menyelesaikan pekerjaan dengan cara baru dan lebih efisien dari sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan merupakan kondisi yang akan membangun kegiatan pertumbuhan ekonomi.

Teori ekonomi menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi serta adanya keterkaitan dengan faktor-faktor tersebut sehingga terjadi proses pertumbuhan. Banyak terdapat teori-teori pertumbuhan ekonomi, tetapi tidak ada satu teori pun yang dapat menjadi acuan yang baku, karena masing-masing teori mempunyai ciri khas sendiri sesuai dengan latar belakang teori tersebut.

Teori pertumbuhan ekonomi yang dapat dipaparkan dan dianggap cukup untuk menerangkan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yaitu teori Solow-Swan. Teori ini

dikembangkan oleh Robert Solow (*Massachusetts Institute of Technology*) dan Trevor Swan (*The Australian National University*). Menurut teori ini, pertumbuhan ekonomi bergantung pada penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan oleh analisis klasik, bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh dan kapasitas peralatan modal akan tetap sepenuhnya digunakan sepanjang waktu.

teori ini memiliki pendapat tentang rasio modal-output ( $\text{capital-output ratio} = \text{COR}$ ) bahwa COR dapat berubah dan bersifat dinamis. Untuk menciptakan sejumlah output tertentu, dapat menggunakan jumlah modal yang berbeda-beda dengan bantuan tenaga kerja yang jumlahnya berbeda-beda sesuai dengan yang dibutuhkan. Jika modal yang digunakan lebih banyak maka tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit, sebaliknya jika yang digunakan modalnya lebih sedikit maka lebih banyak tenaga kerja yang digunakan. Dengan adanya fleksibilitas ini suatu perekonomian mempunyai kebebasan yang tak terbatas dalam menentukan kombinasi modal dan tenaga kerja yang akan digunakan untuk menghasilkan tingkat output tertentu.

Dalam kebijakan fiskal ada beberapa kebijakan anggaran yang diketahui yaitu anggaran berimbang, anggaran surplus dan anggaran defisit. Dalam pengertian umum, anggaran berimbang adalah dimana suatu kondisi penerimaan sama dengan pengeluaran. Anggaran surplus adalah pengeluaran yang lebih kecil dari penerimaan, sedangkan anggaran defisit adalah anggaran yang pengeluarannya lebih besar dari penerimaannya. Anggaran surplus digunakan bila pemerintah ingin mengatasi masalah inflasi, Sedangkan jika pemerintah ingin mengatasi masalah pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, dapat menggunakan anggaran defisit. Jika pemerintah merencanakan peningkatan

pertumbuhan ekonomi untuk mengurangi angka pengangguran maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah terdiri dari pengeluaran rutin atau belanja aparatur daerah dan pengeluaran pembangunan atau belanja pelayanan public.

Pengeluaran Pemerintah Versi Keynes, menurut versi Keynes pengeluaran pemerintah adalah salah satu unsur permintaan agregat. Konsep perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran bahwa  $Y = C + I + G + X - M$ . Rumus ini dikenal sebagai identitas pendapatan nasional. Variabel Y melambangkan pendapatan nasional sekaligus menandakan penawaran agregat. Sedangkan variabel-variabel yang ada di ruas kanan disebut sebagai permintaan agregat. Variabel G merumuskan pengeluaran pemerintah. Dengan membandingkan nilai G dan Y serta mengamati dari waktu ke waktu. Dengan begitu dapat diketahui seberapa besar kontribusi pengeluaran pemerintah dalam pembentukan pendapatan nasional (Dumairy, 1996) teori pembangunan dan pengembangan pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang mengkaitkan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang telah dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. (1) Tahap awal, pada tahap awal perkembangan ekonomi persentase investasi besar, sebab pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (2) Tahap menengah, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun peranan investasi swasta sudah semakin membesar. (3) Tahap lanjut, pembangunan ekonomi dan aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti program kesejahteraan hari tua dan program pelayanan kesehatan masyarakat (Mangkoesoebroto, 2001).

### **3 Teori Kemiskinan**

Dalam arti yang sebenarnya kemiskinan adalah keadaan kekurangan uang dan barang untuk menjamin kelangsungan hidup. Dalam arti luas, kemiskinan merupakan suatu fenomena multi face atau multidimensional.<sup>3</sup> Chambers (dalam Nasikun)<sup>3</sup> mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu, kemiskinan (proper), ketidakberdayaan (powerless), kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), ketergantungan (dependence), dan keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis.

Hidup dalam kemiskinan bukan hanya hidup dalam kekurangan uang dan pendapatan rendah, tetapi juga banyak hal lain yang ikut menjadi faktor karna kemiskinan seperti tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri. Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- A. Kemiskinan absolut: bila pendapatannya di bawah garis kemiskinan atau tidak cukup untuk memenuhi pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja.
- B. Kemiskinan relatif: kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan pada pendapatan.
- C. Kemiskinan kultural: mengacu pada persoalan sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh faktor budaya, seperti tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan, malas, pemboros, tidak kreatif meskipun ada bantuan dari pihak luar.

D. Kemiskinan struktural: situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, tetapi seringkali menyebabkan suburnya kemiskinan.

Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perbulan di bawah garis kemiskinan.

#### **4 Hubungan PAD dengan IPM**

Salah satu sumber yang paling penting dalam penyelenggaraan desentralisasi (otonomi daerah) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Besar kecilnya PAD dapat meningkatkan atau mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat (Setyowati dan Suparwati, 2012). Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar PAD yang dimiliki pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Jika suatu daerah semakin mandiri maka Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut akan sangat mampu untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri. PAD yang merupakan penerimaan daerah diharapkan mampu menambah investasi belanja modal agar terjadi perbaikan kualitas pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik tentunya akan berdampak pada semakin sejahteranya masyarakat.

IPM merupakan sebuah indeks komposit (gabungan) dari indeks pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang diharapkan dapat mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia yang dilihat dari penduduk yang berpendidikan, sehat dan berumur panjang, berketerampilan serta

mempunyai pendapatan untuk layak hidup (BPS, 2012:18). Peningkatan kualitas manusia pada suatu wilayah melalui pembangunan manusia memiliki kontribusi yang besar untuk menentukan keberhasilan pembangunan dan pengelolaan di wilayahnya, karena dengan peningkatan kualitas manusia yang tercermin dari IPM diharapkan mampu menunjang pembangunan di berbagai bidang.

Hubungan Pendapatan asli Daerah (PAD) dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Provinsi Bali sangat berpengaruh antara keduanya. Provinsi Bali merupakan daerah yang kaya akan budaya dan adat istiadat sehingga sektor pariwisatanya dapat berkembang secara pesat.

Dengan daya tariknya tersebut Provinsi Bali mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) cenderung besar serta kontribusinya terus mengalami kenaikan dan akan mempengaruhi penerimaan daerah, yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk memperbaiki pelayanan terhadap masyarakat sehingga pembangunan manusia di Provinsi Bali dapat berkembang.

Salah satu indikator pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) akan mengalami peningkatan melalui kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat, infrastuktur, serta pendidikan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah.

## **5 Hubungan Kemiskinan dengan IPM**

Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang atau golongan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atau kebutuhan pokok. Kemiskinan juga disebut dengan suatu tingkat kekurangan materi pada seseorang atau segolongan orang yang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum, atau yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Standar kehidupan yang minimum ini secara langsung akan berpengaruh terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin atau kurang mampu. Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga dapat berpengaruh melalui realisasi belanja negara dalam pelayanan publik. Peranan pemerintah dalam melakukan kebijakan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal disesuaikan pada pertimbangan, bahwa daerah lah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat di daerahnya sendiri, sehingga pemberian otonomi daerah diharapkan dapat membuat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi daerah dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh pembangunan manusia. Pembangunan manusia adalah suatu hal yang penting untuk ditingkatkan dengan cara mengurangi angka kemiskinan, sehingga perlu diprioritaskan alokasi belanja untuk keperluan ini dalam penyusunan anggaran (Suyanto dalam Christy et al, 2009). Melihat pernyataan di atas, pembangunan manusia atau peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting dalam strategi kebijakan pembangunan nasional. Penekanan terhadap pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan menjadi suatu kebutuhan karena kualitas manusia di suatu wilayah memiliki andil besar dalam menentukan keberhasilan pengelolaan pembangunan wilayahnya.

### 2.3 Kerangka Berpikir

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali Tahun 2010-2019

#### MASALAH PENELITIAN

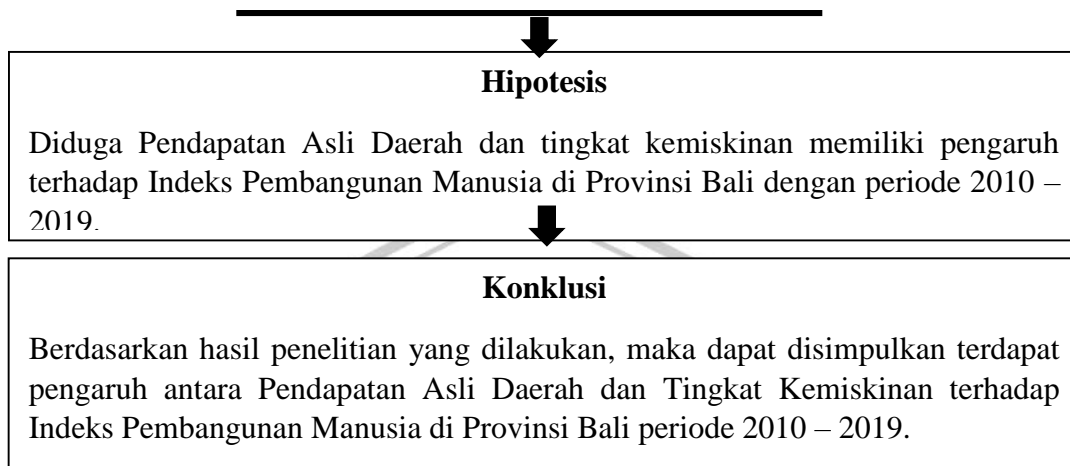
Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat Kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks pembangunan Manusia dengan menggunakan periode tahun 2010 – 2019

#### Tinjauan Pustaka

1. Pendapatan Asli Daerah
2. Tingkat Kemiskinan
3. Indeks Pembangunan Manusia

#### Metode Penelitian

1. Quantitative Time Series
2. Badan Pusat Statistik (BPS)
3. Regresi Linier Berganda (OLS)



## 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan teori yang di dapat dari beberapa literature Pendapatan Asli Daerah dan Tingkat kemiskinan berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Maka dari itu Penulis menyusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

$H_1$  = Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

$H_2$  = Kemiskinan memiliki pengaruh signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Hipotesis ini di dasarkan oleh beberapa literature, salah satunya disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Bali, dan disebutkan pada literature lainnya bahwa Kemiskinan juga meiliki pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada

201710180311237

Fikri Hayqal Brahma Agung  
Ekonomi Pembangunan

penelitian ini juga dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sedangkan Tingkat Kemiskinan berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

